



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Soekarno – Hatta No. 193 Kendal Telp. / Fax. (0294) 381225 Kode Pos 51311

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 900.1.3.5/9718 /2025

TENTANG

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu ditunjuk pejabat/pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu (PBP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - f. Menyiapkan laporan SKPD;
 - g. Melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran; dan
 - h. Mengajukan laporan SPJ yang telah diverifikasi kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran kas atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran yang mengelola gaji bertugas :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan pengurusan gaji untuk PNS;
 - b. Membuat data mutasi gaji pegawai;
 - c. Mengambil, menerima dan meneliti kebenaran daftar gaji dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk dibuatkan SPP gaji bulan yang akan datang;
 - d. Menyiapkan bahan pengajuan SPP Gaji yang telah ditandatangani Bendahara Gaji dan Atasan Langsung

- untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal untuk dimintakan pembayaran;
- e. Membuat daftar gaji susulan, rapel kekurangan gaji dan lain-lain untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal guna dimintakan pembayaran;
 - f. Mengambil SP2D untuk diteliti sesuai dengan pengajuan SPP guna dibukukan ke dalam buku kas umum;
 - g. Membuat struk gaji pegawai bulanan;
 - h. Membuat surat pemindahan rekening atas gaji bulanan pegawai; dan
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan atau tertulis.
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) bertugas :
- a. Mencatat bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas pembantu khusus pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan;
 - b. Mencatat penerimaan dan penyetoran PPN/PPH pada buku pajak;
 - c. Menghimpun bukti-bukti pengeluaran ke dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;
 - d. Menyiapkan dokumen-dokumen administrasi pelaksanaan APBD; dan
 - e. Menyiapkan jadwal kegiatan unit kerja beserta alokasi dananya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Desember 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Para pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 900.1.3.5/ 978 /2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2026

No	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Keterangan
1	Ketua Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	

KEMAHKAMAH PERLITBANG
KABUPATEN KENDAL

IZZUDDIN LATIF

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 900.1.3.5/ 9716/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	PPTK	PBP	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Diah Uswatun Chasanah, S.E.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Ketua Tim Keuangan	Mulyono	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

				3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mulyono	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program	Ajeng Widya Yusnita, ST	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik 3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya	Machmud Setiawan, S.E.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
		Adi Putra, S.E.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana	Indah Triariyanti, S.T.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	

				5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Dian Nur Phawestri, S.Sos	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1. Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	
			Invensi dan Inovasi	1. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi 2. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual 3. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Divusi Inovasi 4. Pemantauan dan Evaluasi Invensi dan Inovasi 5. Penyusunan Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi	

